

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep Hak dan Kewajiban dalam Konteks Tata Tertib

a. Definisi Hak dan Kewajiban

Hak dapat diartikan wewenang menurut hukum. Sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan tidak boleh ditinggalkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1996). 31 Hak atau wewenang juga berarti atau kekuasaan yang diberikan hukum menurut (samidjo 1986).

Hak dan kewajiban Warga Negara menurut Sumantri (2001), merupakan syarat objektif dalam semua organisasinegara demokratis. karena itu, rakyat bangsa yang menempati sebuah negara mencantumkan dalam konstitusi negara. biasanya antara ketentuan pasal pasal hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi dengan kenyataannya sedikit atau banyak berbeda. (Wahib, 2021)

b. Perkembangan Kognitif Siswa Sekolah Dasar

Menurut (Zikrulloh, dkk 2025: 61) secara bahasa kognitif berasal dari bahasa latin "Cogitare" artinya berfikir. Dalam kamus besar bahasa indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi, atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah

kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Dalam psikologi, kognitif mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, perhatian, menyangka, mempertimbangkan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, keyakinan dan sebagainya.

Menurut (Hidayati, 2022: 16) kognitif adalah suatu proses berfikir yang melibatkan suatu pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki individu untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Dengan kemampuan berfikirnya, maka peserta didik dapat mengeksplorasi dirinya sehingga dapat memperoleh berbagai pengetahuan baru, dari pengetahuannya tersebut dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

Menurut (Pitriani, dkk 2023: 35) Piaget menjelaskan bahwa tahapan perkembangan kognitif dibagi kedalam empat tahapan, yakni tahapan sensorimotor, pra-operasional, operasional konkret dan operasional formal. Namun disini akan dijelaskan tiga tahapan pertama. Berikut tiga bahasan tahapan perkembangan anak menurut Jean Piaget.

1. Tahap Sensorimotor

Perkembangan koognitif tahap ini terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada tahap sensori ini, bayi bergerak secara reflex instinktif pada saat lahir sampai pada permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun pemahaman tentang dunia melalui pengoordinasian pengalaman pengalaman sensor dengan tindakan fisik. (Desmita, 2010). Pada tahap ini pemikiran anak sudah mulai melibatkan pendengaran, pergeseran, penglihatan, dan persentuhan serta selera. Artinya pada masa ini anak memiliki kemampuan untuk menangkap segala sesuatu dengan indranya. Bagi Piaget masa ini sangat penting untuk pembinaan perkembangan pemikiran sebagai dasar untuk mengembangkan intelegasinya.

2. Tahap Pra Operasional

Fase ini terjadi pada rentan usia 2-7 tahun. Pada tahap ini anak sudah mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar. Kata-kata dan gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan Tindakan fisik. Cara berfikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis (Marinda, 2020).

3. Tahap Operasional Konkrit

Tahap ini terjadi pada rentang usia 7-11 tahun. Usia 7-12 tahun merupakan usia Ketika anak sudah memasuki masa sekolah. Sebagaimana menurut teori kognitif Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar disebut pemikiran operasional konkret (concrete operational) (Desmita, 2015). Makna operasional konkret yang dimaksud oleh Piaget yaitu kondisi Dimana anak-anak sudah dapat memfungsikan akal nya untuk berfikir logis terhadap sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Pada tahapan ini, pemikiran logis menggantikan pemikiran intuitif (naluri) dengan syarat pemikiran tersebut dapat diaplikasikan menjadi contoh-contoh yang konkret atau spesifik. Akan tetapi, kekurangan dari pada fase ini adalah ketika anak dihadapkan dengan permasalahan yang bersifat abstrak (secara verbal) tanpa adanya objek nyata, maka ia akan mengalami kesulitan bahkan tidak mampu untuk menyelesaikannya dengan baik (Santrock, 2007). Akan tetapi, kekurangan dari pada fase ini adalah ketika anak dihadapkan dengan permasalahan yang bersifat abstrak (secara verbal) tanpa adanya objek nyata, maka ia akan mengalami kesulitan bahkan tidak mampu untuk menyelesaikannya dengan baik.

Siswa kelas V SDN 01 Sungai Ukoi secara kronologis berada pada rentang usia 10-11 tahun, yang menurut Jean Piaget

merupakan fase akhir dari Tahap Operasional Konkret. Pada fase ini, kemampuan kognitif siswa telah berkembang dalam hal berpikir logis, namun operasi logis tersebut hanya dapat dilakukan jika objek yang dibahas bersifat nyata (*konkret*).

Dalam konteks aturan sekolah, siswa kelas V tidak bisa hanya diberikan konsep abstrak seperti 'tanggung jawab' tanpa adanya visualisasi atau contoh perilaku. Pemahaman mereka tentang kewajiban sangat bergantung pada apa yang mereka lihat dilakukan oleh guru (teladan) dan apa yang mereka alami langsung (pengalaman empiris). Oleh karena itu, jika aturan tata tertib hanya disampaikan secara lisan tanpa dicontohkan atau dibiasakan secara nyata, maka pemahaman kognitif siswa akan terhenti pada tahap hafalan dan sulit bertransformasi menjadi kesadaran moral yang mandiri.

2. Tata Tertib sebagai Instrumen Edukatif, preventif dan korektif

Menurut Hurlock 2001:85 dalam (Andhika, 2024:15), tata tertib sekolah dipandang bukan sekadar sebagai instrumen pengontrol, melainkan sebagai manifestasi konkret dari regulasi institusional yang mengemban dua fungsi fundamental dalam mengonstruksi identitas anak sebagai individu yang bermoral. Kedua fungsi tersebut dapat diuraikan secara mendalam sebagai berikut:

a. Fungsi Edukatif (Internalisasi Perilaku Sosial)

Fungsi pertama menekankan bahwa setiap butir aturan memiliki signifikansi nilai pendidikan yang tinggi. Peraturan bertindak sebagai media pengenalan atau sosialisasi bagi anak mengenai ragam perilaku yang dipandang ideal, patut, dan disetujui oleh anggota kelompok sosialnya. Dalam konteks ini, tata tertib memberikan peta navigasi moral yang jelas, anak tidak hanya sekadar patuh, tetapi belajar memahami standar etika dan ekspektasi sosial yang berlaku di lingkungannya. Melalui pemahaman terhadap apa yang dianggap "benar" oleh kelompok, anak secara bertahap menginternalisasi nilai-nilai kolektif tersebut ke dalam skema kognitif dan perilaku harian mereka.

b. Fungsi Preventif dan Korektif (Pengendalian Perilaku)

Fungsi kedua berkaitan dengan peran peraturan sebagai instrumen untuk membatasi atau mengekang kecenderungan perilaku yang dipandang tidak diinginkan atau merugikan tatanan sosial. Sebagai ilustrasi dalam lingkup mikrosistem, apabila suatu regulasi menetapkan larangan bagi seorang anak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka aturan tersebut berperan sebagai rambu hukum yang tegas. Ketika anak melakukan pelanggaran, adanya teguran atau konsekuensi akan memberikan sinyal korektif bahwa tindakan tersebut secara moral tidak dapat diterima. dengan demikian, peraturan berfungsi sebagai "pagar

pembatas" yang mencegah anak untuk melakukan sesuatu tanpa pikir panjang yang menyimpang, sekaligus mendidik mereka untuk senantiasa menghormati batasan serta hak milik orang lain dalam interaksi sosial.

1. Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran PKn di SD

a. Hakikat Pendidikan Karakter PKn

Pendidikan Kewarganegaraan identik dengan karakter, Adapun Pendidikan Karakter menurut (Wahab & Sapriya, 2011) merupakan sistem untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang meliputi beberapa komponen, yaitu pengetahuan, kesadaran, dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, lingkungan, hingga kebangsaan. Pendidikan Karakter merupakan aspek penting dalam membentuk generasi emas yang berakhlak mulia, berintegritas, dan berdaya saing tinggi. Sebagaimana dikatakan Dewey dalam buku (Muin, 2019) bahwa Pendidikan Karakter merupakan tujuan umum dari pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sehingga Pendidikan Karakter itu sangat penting bagi peserta didik. Dapat kita simpulkan bahwa Pendidikan Karakter merupakan sstem untuk penanaman nilai-nilai karakter yang merupakan tujuan umum dari suatu pendidikan. (Dinanti, dkk 2024:3)

Menurut Anisyah, dkk (2023) dalam (Zai, dkk 2024:3) Pendidikan Karakter adalah yang mempunyai hakikat dan makna

yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian peserta didik, agar menjadi manusia yang baik, warga negara dan warga negara yang baik. Oleh karena itu hakikat pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan sangat menarik jika dikaitkan dengan pendidikan karakter. Hal ini dikarenakan PKn merupakan ilmu umum yang menggunakan kekuatan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui proses pembelajaran seperti ini siswa dapat menemukan konsep, memecahkan masalah dan menerapkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut (Wana, dkk 2023: 476) Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PKN dengan mengoptimalkan sikap ilmiah tentu tidak bisa berjalan dengan tanpa kendala. Standar isi mata pelajaran PKn yang ada sekarang dirasa masih terlalu banyak untuk tingkat SD sedangkan waktu yang tersedia terbatas, ditambah lagi tuntutan mata pelajaran lain yang jumlahnya banyak untuk tingkat anak SD, akibatnya banyak guru yang lebih berorientasi untuk menghabiskan materi pelajaran karena selama ini hasil akhir dari pembelajaran PKn masih dinilai dari kognitifnya. Hal ini tentu mengesampingkan aspek afektif dan psikomotorik siswa.

Berdasarkan uraian dari Anisyah, dkk (2023) dan Wana dkk (2023), dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter dalam pembelajaran PKn merupakan upaya fundamental untuk membentuk kepribadian dan nilai-nilai luhur peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Namun, dalam tataran implementasi di jenjang Sekolah Dasar, terdapat tantangan besar berupa beban materi yang terlalu padat dan keterbatasan waktu, yang sering kali menyebabkan guru lebih berfokus pada ketuntasan materi secara kognitif. Akibatnya, esensi pendidikan karakter yang seharusnya menyentuh aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (perilaku) cenderung terabaikan demi mengejar hasil nilai akademik semata.

b. Implementasi Profil Pelajar Pancasila

Menurut (Mulyani, dkk 2023: 1639) profil siswa pancasila merupakan implementasi kurikulum merdeka berdasarkan implementasi yang diharapkan. Profil pelajar Pancasila diimplementasikan pada saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Hal ini sesuai dengan (Santoso, dkk 2023) bahwa guru wajib mengimplementasikan “profil pelajar pancasila” yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan dan Kebudayaan 2020 -2024 Proyek penguatan profil pelajar Pancasila harus dilaksanakan di kelas. Yang dimana mewujudkan peserta didik

yang berdimensi beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, keberagaman global, gotong royong, kemandirian, berpikir kritis dan kreatif. Profil Pelajar Pancasila mencakup enam kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi esensial. Keenam hal tersebut saling berhubungan dan saling menguatkan. Oleh karena itu, keenam dimensi tersebut harus dikembangkan secara bersamaan, tidak terpisah-pisah, untuk menciptakan profil mahasiswa Pancasila yang utuh.

Irawati, dkk (2022) menyatakan bahwa tujuan dari Profil Pelajar Pancasila (P3) adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pembentukan karakter. Pengembangan profil siswa Pancasila yang mencakup karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi warga dunia yang baik harus diperkenalkan sejak dini di semua jenjang pendidikan. Dengan upaya tersebut, enam dimensi profil pelajar Pancasila dapat terbentuk secara utuh dan menyeluruh, yaitu pelajar yang:

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia
2. Berkebinekaan global
3. Bergotong-royong
4. Mandiri
5. Bernalar kritis

6. Kreatif

Implementasi profil pelajar pancasila dalam ekosistem pendidikan di sekolah dasar secara esensial menitikberatkan pada pembentukan karakter yang holistik, di mana dimensi berakhlak mulia dan mandiri menjadi pilar utama dalam menumbuhkan kesadaran siswa terhadap kewajibannya. Dimensi berakhlak mulia mengarahkan siswa untuk memahami bahwa ketaatan terhadap tata tertib merupakan wujud tanggung jawab moral kepada tuhan dan sesama, sementara dimensi mandiri mendorong siswa untuk meregulasi diri dan mengambil inisiatif dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah tanpa ketergantungan pada pengawasan eksternal. Dengan demikian, kesadaran akan kewajiban bukan lagi dianggap sebagai beban instruksional, melainkan sebuah fondasi karakter yang lahir dari integritas pribadi dan kemandirian perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka merupakan upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pembentukan karakter siswa yang utuh dan holistik di seluruh jenjang pendidikan. Melalui penguatan enam dimensi esensial yang saling berhubungan, khususnya dimensi berakhlak mulia dan mandiri, siswa diarahkan untuk memiliki kesadaran moral serta kemampuan regulasi diri dalam menjalankan kewajiban dan tata tertib sekolah. Dengan

demikian, kepatuhan siswa tidak lagi bersifat terpaksa atau bergantung pada pengawasan luar, melainkan bertransformasi menjadi fondasi karakter yang kuat dan mandiri sebagai perwujudan nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

c. Perkembangan Moral

Menurut (Budiman & Mubarak, 2025: 2663) Perkembangan moral merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembentukan karakter peserta didik, yang tidak hanya ditentukan oleh perilaku tampak, tetapi juga oleh penalaran yang mendasarinya.

Lawrence Kohlberg, melalui teorinya, menekankan bahwa perkembangan moral berlangsung secara bertahap dan berkaitan erat dengan kemampuan individu dalam melakukan penalaran moral. Hal ini memperluas gagasan Piaget dengan menekankan bahwa moralitas tidak sekadar hasil dari sosialisasi, melainkan proses internalisasi nilai yang terus berkembang sepanjang hidup. Dengan demikian, pemahaman terhadap teori perkembangan moral Kohlberg sangat penting untuk diaplikasikan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan agama islam yang memiliki tujuan membentuk insan berakhlak mulia.

Pada tingkat prakonvensional, penalaran moral siswa kelas V cenderung didasarkan pada konsekuensi fisik yang diterima secara langsung, di mana aturan dipatuhi bukan karena kesadaran nilai, melainkan sebagai upaya untuk menghindari hukuman dari otoritas

guru atau untuk mendapatkan imbalan tertentu. Dalam konteks di SDN 01 Sungai Ukoi, tahap ini menjelaskan fenomena siswa yang bersikap disiplin hanya saat diawasi, karena nalar moral mereka masih bersifat eksternal dan belum mencapai tahap internalisasi nilai yang tulus. Akibatnya, kewajiban dianggap sebagai beban instruksional yang harus dipenuhi demi keamanan posisi mereka di kelas, bukan sebagai bentuk tanggung jawab pribadi dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif.

2. Peran Guru dalam Penanaman Nilai Kewajiban

Menurut (Ariska & Parida, 2025:1525) Guru merupakan salah satu pihak yang paling bertanggungjawab atas pembelajaran serta hasil yang diperoleh dikelas. Pencapaian tujuan pembelajaran yang berupa prestasi belajar merupakan hasil dari kegiatan belajar-mengajar.

Menurut (Nurzannah, 2022: 28-32) Agar terciptanya pembelajaran yang efektif itu, maka dalam hal ini peran guru sangat menentukan. Bagaimana peran guru dalam mengkondisikan siswa, memberikan motivasi dan menjadi fasilitator bagi mereka dalam pembelajaran. Peran guru dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Guru Sebagai Motivator

Pendidik atau guru adalah tenaga profesional yang bertugas dalam hal merencanakan pembelajaran, membimbing proses pembelajaran hingga pada tahap melakukan evaluasi. Pendidik menjadi unsur yang penentu dalam berhasil atau tidaknya pendidikan

yang dilaksanakan. Karenanya boleh dikatakan pendidikan yang memenuhi etika kelayakan adalah pendidikan yang menjunjung tinggi tanggung jawab dalam penyelenggaraanya (Wandi & Nurhafizah, 2019: 34).

Menurut Umar Sidiq (2018), peran guru sebagai motivator ini dimaksudkan kepada peran guru sebagai educator dan supervisor. Untuk meningkatkan semangat dan gairah belajarnya, siswa membutuhkan motivasi yang tinggi. Motivasi itu sendiri berdasarkan sumbernya terbagi dua, yakni motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri peserta didik. Sebaliknya, motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar diri peserta didik. Dan motivasi jenis kedua ini lah yang menjadi fokus perhatian guru untuk membangkitkannya.

2. Guru Sebagai Fasilitator

Menurut Rudi Hartono (2013: 52), menyatakan bahwa Guru sebagai fasilitator tidak hanya terbatas menyediakan hal-ha lyang sifatnya materi, tetapi lebih itu adalah bagaimana memfasilitasi peserta didik agar mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna serta memperoleh keterampilan untuk hidup. Tugas guru sebagai fasilitator ini, dapat dilaksanakan diantaranya dengan membuat program dan mengimplementasikannya dengan prinsip pembelajaran aktif, edukatif kreatif, dan menyenangkan. Sebagai fasilitator guru

tidak hanya menjadikan dirinya sebagai sumber belajar satu-satunya, melainkan memanfaatkan juga sumber-sumber lainnya seperti buku-buku di perpustakaan, laboratorium, narasumber bahkan diri peserta didik itu sendiri. Sebagai fasilitator guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran (Sanjaya, 2011: 182). Sebagai fasilitator, guru berperan sebagai pembantu dalam pengalaman belajar, membantu perubahan lingkungan, serta membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan dan keinginan.

3. Guru sebagai Teladan (Modeling)

Menurut (Mahtumah, 2024:27) guru memiliki peranan yang sangat vital dalam membentuk karakter pribadi peserta didik. Dalam menjalankan peran tersebut, guru dituntut untuk senantiasa memberikan teladan yang baik, baik melalui ucapan maupun perilaku sehari-hari, sehingga keberadaan guru dapat dijadikan contoh yang positif oleh peserta didiknya. Lebih dari itu, guru juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik melalui penentuan kegiatan, pelaksanaan, serta pembiasaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter dalam setiap proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut, strategi guru dalam menanamkan disiplin pada siswa kelas V SDN 01 Sungai Uko dilakukan melalui sinergi peran sebagai pengontrol yang konsisten dalam mengevaluasi

perilaku, fasilitator yang menyediakan pengalaman belajar bermakna agar aturan tidak dirasakan sebagai beban, serta yang paling utama adalah sebagai model keteladanan (*modeling*) melalui integritas ucapan dan tindakan sehari-hari. Strategi ini mengarahkan guru untuk tidak sekadar menuntut kepatuhan kaku, melainkan membimbing siswa melalui pembiasaan dan lingkungan yang kondusif, sehingga pemahaman akan kewajiban bertransformasi dari motivasi eksternal berupa rasa takut akan sanksi menjadi motivasi internal yang lahir dari kesadaran moral dan karakter mandiri sesuai profil pelajar Pancasila.

5. Indikator pemahaman kewajiban dalam tata tertib

Dalam upaya memetakan dan mengukur kedalaman pemahaman siswa kelas V mengenai konsep hak dan kewajiban secara akurat, ada beberapa indikator yang digunakan, perumusan indikator ini tidak hanya bertumpu pada satu aspek tunggal, melainkan merujuk pada integrasi tiga dimensi utama perkembangan individu yang mencakup ranah kognitif, afektif, serta psikomotorik. Pendekatan multidimensi (metode pemecahan masalah) ini digunakan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan mampu menyentuh seluruh urutan nilai yang berkesinambungan dengan pemahaman siswa, mulai dari penguasaan konsep secara teoritis hingga proses mewujudkan potensi menjadi kenyataan dalam tindakan nyata. Secara lebih terperinci, ketiga dimensi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Kognitif:

Ranah kognitif pada dasarnya merepresentasikan sebuah rangkaian perkembangan intelektual yang berfokus pada dinamika serta kapasitas proses berpikir individu. Sejalan dengan pemikiran Ibda, 2015:27 (Apsari, 2021: 38) kemampuan kognitif ini dipahami sebagai suatu rangkaian evolusi mental yang bermula dari tahap pengolahan informasi terhadap objek-objek yang bersifat nyata atau konkret. Pada tahap awal ini, individu berinteraksi dan memahami dunia melalui fenomena yang dapat diindra secara langsung.

seiring dengan kematangan intelektual dan stimulasi pendidikan, proses berpikir tersebut mengalami peningkatan menuju kemampuan untuk mengonstruksi, menganalisis, serta menginternalisasi konsep-konsep yang bersifat lebih abstrak dan teoretis. Dalam fase ini, individu mulai mampu mengembangkan pola pikir yang logis, sistematis, dan mampu menarik kesimpulan dari premis-premis yang tidak selalu nampak secara fisik. Dalam konteks pemahaman hak dan kewajiban, dimensi kognitif ini menjadi pintu gerbang utama bagi siswa untuk beralih dari sekadar menghafal butir aturan (tahap konkret) menuju pemahaman filosofis mengenai mengapa aturan tersebut diperlukan demi keadilan bersama (tahap abstrak dan logis).

2. Dimensi afektif

Ranah afektif merupakan dimensi fundamental dalam perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan emosi, sikap, serta nilai-nilai personal yang diinternalisasi ke dalam kepribadian. Selaras dengan pemikiran Hendarni, 2013 dalam (Apsari, 2021:45), kompetensi afektif tidak hanya mencakup satu aspek tunggal, melainkan merupakan sebuah penyatuan dari berbagai variabel perilaku moral dan sosial yang sangat penting. Aspek-aspek tersebut meliputi kemampuan kerjasama dalam berinteraksi dengan orang lain, tingkat kedisiplinan dalam mematuhi norma dan keteraturan, serta adanya keberanian untuk mengekspresikan gagasan secara bertanggung jawab.

Dimensi afektif juga mencakup sikap toleransi atau keterbukaan dalam menghargai perbedaan di lingkungan sekolah, serta kesungguhan atau komitmen yang kuat dalam menyelesaikan setiap tugas dan kewajiban. Dalam konteks pemahaman kewajiban, aspek afektif ini berperan sebagai penggerak nurani siswa, di mana siswa tidak hanya tahu secara intelektual tentang aturan, tetapi juga memiliki kesadaran emosional dan kemauan untuk menjalankan kewajiban pribadi dengan penuh integritas. Dengan demikian, penguasaan pada ranah afektif menjadi indikator utama bahwa nilai-nilai kewarganegaraan telah benar-benar meresap ke dalam karakter siswa.

3. Dimensi psikomotorik

Ranah psikomotorik merupakan domain hasil belajar yang merepresentasikan bentuk aktualisasi diri melalui keterampilan fisik (*skill*) serta kapasitas individu untuk bertindak secara konkret dan terukur. Merujuk pada pemikiran Sudjana, 2013 dalam (Apsari, 2021:38) , dimensi ini merupakan muara dari proses pembelajaran, di mana pengetahuan kognitif dan kesadaran afektif yang telah diserap oleh siswa diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Selaras dengan klasifikasi yang dipaparkan oleh Hendarni 2013 dalam (Apsari, 2021: 46), aspek psikomotorik dalam lingkungan pendidikan berkembang melalui tahapan-tahapan yang bersifat hierarkis dan progresif, yang meliputi:

1. Tahap Menirukan (*Imitation*): Pada fase awal, siswa merespons nilai-nilai kewajiban dengan cara mengamati dan menduplikasi perilaku yang dicontohkan oleh guru atau model peran di sekolah.
2. Tahap Memanipulasi (*Manipulation*): Siswa mulai mampu melakukan tindakan-tindakan tertentu berdasarkan instruksi atau pedoman tertulis (seperti teks tata tertib), tanpa harus melihat contoh fisik secara langsung.
3. Tahap Pengalamiahan/Presisi (*Naturalization*): Dalam konteks ini, perilaku patuh terhadap aturan telah menjadi sebuah

tindakan yang spontan, otomatis, dan berlangsung secara natural karena sudah menjadi kebiasaan yang mapan.

4. Tahap Artikulasi (*Articulation*): Siswa memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai keterampilan dan perilaku secara harmonis, menyesuaikan tindakan mereka dengan situasi dan kondisi lingkungan kelas yang dinamis.

Dapat disimpulkan bahwa pemetaan pemahaman siswa kelas V SDN 01 Sungai Ukoi terhadap konsep hak dan kewajiban merupakan sebuah proses integratif yang melibatkan dimensi kognitif sebagai fondasi intelektual untuk memahami aturan dari tahap konkret menuju abstrak, dimensi afektif sebagai penggerak nurani dan komitmen emosional dalam menginternalisasi nilai, serta dimensi psikomotorik sebagai muara aktualisasi diri melalui tindakan nyata yang terukur. Ketiga dimensi ini membentuk satu kesatuan hierarkis yang memungkinkan siswa tidak sekadar menghafal tata tertib, tetapi mampu mentransformasikannya menjadi perilaku disiplin yang spontan, presisi, dan natural dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

B. Kajian Pustaka Yang Relevan

Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Hamzah, dkk 2022: 160) dengan judul “Analisis Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran PKN Materi Hak Dan Kewajiban Kelas V SD Negeri 35 Palembang” Penelitian ini menerapkan

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa capaian belajar siswa kelas V SD Negeri 35 Palembang pada materi PKn tentang hak dan kewajiban masih belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase penguasaan indikator penelitian, di mana 53% siswa belum memahami konsep perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pada indikator pembedaan peran, sebanyak 60% siswa ditemukan masih kesulitan dalam memilah tindakan mana yang termasuk hak yang mereka terima dan mana yang merupakan kewajiban yang harus dikerjakan. Rendahnya hasil belajar ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal yang mencakup minat, motivasi, dan gaya belajar siswa, serta faktor eksternal yang meliputi pengaruh dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Saharuddin, dkk 2025:4) dengan judul “Analisis Pemahaman Hak Dan Kewajiban Pada Pelajaran PPKN Kelas IV di SDN No. 78 Balang Kab.Takalar” Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini melibatkan pengamatan langsung pada saat pelaksanaan KKN dan proses mengajar di kelas IV. Data diperoleh melalui kombinasi teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 43 siswa kelas IV SDN No. 78 Balang sebagai subjek penelitian. Pemahaman siswa kelas IV SDN No. 78 Balang Kabupaten Takalar terhadap materi hak dan kewajiban masih rendah, khususnya dalam membedakan hak dan kewajiban di lingkungan rumah dan

lingkungan sekolah. Minimnya penggunaan media pembelajaran interaktif serta metode pengajaran yang kurang variatif menjadi faktor utama kesulitan ini. Direkomendasikan untuk mengembangkan dan menerapkan media pembelajaran interaktif serta meningkatkan peran guru dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kontekstual, agar siswa dapat memahami materi dengan lebih efektif dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Putra, dkk 2025:78) dengan judul Analisis Pemahaman Hak dan Kewajiban Pada Pelajaran PKN Kelas IV di SDIT Al Kautsar, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di SDIT Al Kautsar pada 13 November 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian siswa masih kesulitan dalam membedakan serta mengaplikasikan konsep hak dan kewajiban, baik di rumah maupun di sekolah. Oleh karena itu, disarankan adanya penggunaan media pembelajaran interaktif seperti *Wordwall* untuk meningkatkan efektivitas pemahaman siswa. Media ini memungkinkan adanya interaksi langsung dengan materi sehingga informasi lebih mudah diserap dan diingat. Selain itu, peran guru sangat krusial dalam membangun suasana belajar yang menyenangkan dan berkaitan dengan realitas kehidupan sehari-hari demi meningkatkan antusiasme siswa dalam mata pelajaran PPKN. Melalui strategi ini, siswa diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban secara mendalam agar tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Anastasiya, D. 2024) dengan judul Peningkatan Pemahaman Siswa SD Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Melalui Pembelajaran PKN aktif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review, yang bertujuan untuk menggali pemahaman siswa Sekolah Dasar (SD) mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terlihat metode pembelajaran aktif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak serta kewajiban sebagai warga negara. Selain lebih paham materi, siswa yang belajar dengan cara ini juga mengalami peningkatan dalam kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan tim. Metode ini pun memudahkan siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai kewarganegaraan secara langsung dalam keseharian, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan saling menghargai. Hasil evaluasi juga memperlihatkan adanya perubahan sikap ke arah yang lebih positif pada siswa, yang membuktikan bahwa pembelajaran aktif sangat penting untuk diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan, khususnya di sekolah dasar.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Lupita & Hanifah, 2025) dengan judul Mengatasi Kesulitan Siswa Kelas 3 Dalam Membedakan Hak Dan Kewajiban Melalui Pendekatan Kontekstual, Berdasarkan hasil penelitian ini, para pendidik di tingkat Sekolah Dasar, khususnya kelas 3,

disarankan untuk mengadopsi pendekatan pembelajaran kontekstual dalam mengajarkan materi hak dan kewajiban. Pengembangan rencana pelajaran dan aktivitas pembelajaran yang kreatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa akan sangat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Pelatihan dan pendampingan bagi guru dalam mengimplementasikan pendekatan kontekstual juga diperlukan untuk memastikan efektivitasnya di kelas.

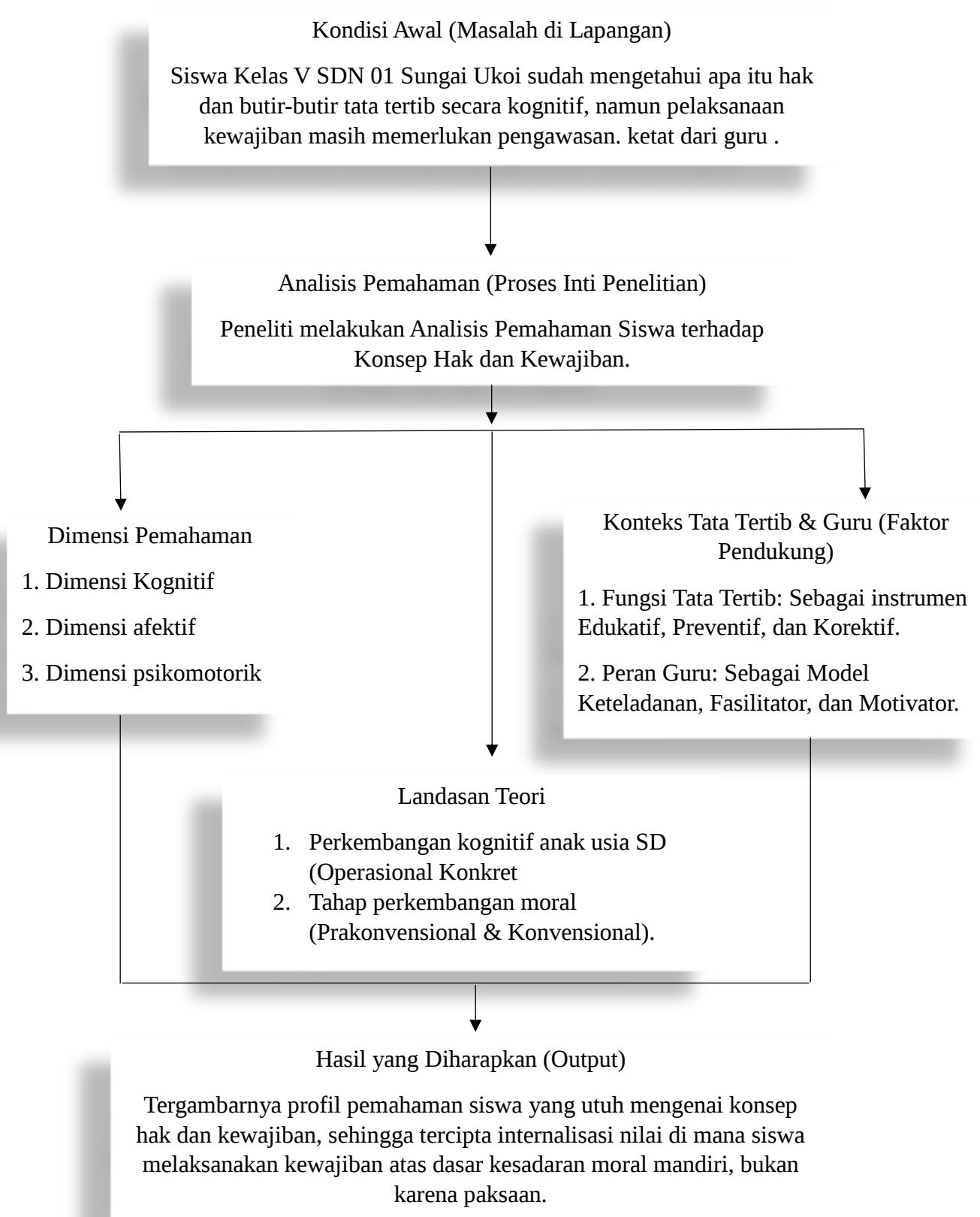
C. Kerangka Konseptual

Menurut (Syahputri, dkk 2023: 161) Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.

Kerangka berpikir merupakan perlengkapan peneliti untuk menganalisa perencanaan dan berargumentasi kecenderungan asumsi ke mana akan dilabuhkan, penelitian kuantitatif kecenderungan akhirnya adalah diterima atau ditolak hipotesis penelitian tersebut, sedangkan penelitian yang berbentuk pernyataan atau narasi-narasi peneliti bertolak dari data dan memanfaatkan teori yang digunakan sebagai bahan penjelasan dan berakhir dengan pembaharuan suatu pernyataan atau hipotesa

Menurut Sugiyono (2019) dalam (Syahputri, dkk 2023: 161), kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara teori dengan berbagai aspek masalah yang diteliti. Instrumen ini berfungsi sebagai fondasi pemikiran yang dirumuskan melalui sintesis fakta, hasil observasi, dan kajian pustaka. di dalamnya, termuat berbagai teori, dalil, serta konsep utama yang menjadi landasan penelitian guna menjelaskan hubungan antarvariabel yang dikaji.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan alur logika yang digunakan peneliti untuk membedah bagaimana pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban bermanifestasi dalam kepatuhan terhadap tata tertib. Alur pemikiran tersebut yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan bagan diatas, berikut uraian penjelasan kerangka konseptual untuk setiap kotak secara berurutan:

1. Masalah penelitian (kondisi nyata)

Ditemukan bahwa siswa kelas V SDN 01 Sungai Ukoi sebenarnya sudah hafal aturan sekolah secara lisan. Namun, dalam praktiknya, mereka hanya tertib jika ada guru yang melihat. Jika tidak diawasi, tanggung jawab seperti piket atau menjaga ketenangan sering terabaikan. Inilah yang disebut sebagai "gap" atau jarak antara pengetahuan dan tindakan.

2. Proses analisis (inti penelitian)

Analisis mendalam untuk mencari tahu mengapa jarak itu terjadi. tidak hanya melihat permukaan saja, tetapi menggali lebih dalam ke arah pemikiran siswa (subjek) dan bagaimana lingkungan sekolah serta guru (konteks) memengaruhi pemahaman tersebut

3. Dimensi pemahaman (fokus pada siswa) membedah siswa menggunakan tiga indikator:

- a. Kognitif: sejauh mana siswa mampu menalar pentingnya aturan, bukan sekadar menghafal.
- b. Afektif: apakah siswa merasa memiliki tanggung jawab moral dan merasa bersalah jika melanggar.
- c. Psikomotorik: bagaimana wujud nyata perilaku siswa sehari-hari tanpa perlu diperintah terus-menerus.

4. Konteks tata tertib & guru (faktor lingkungan) faktor luar yang memengaruhi siswa:

- a. Fungsi tata tertib: apakah aturan kelas sudah bersifat mendidik (edukatif), mencegah pelanggaran (preventif), dan memperbaiki kesalahan (korektif).
- b. Peran guru: bagaimana strategi guru kelas V SDN 01 Sungai Ukoi dalam memberikan contoh nyata (modeling) dan membimbing siswa memahami hak serta kewajibannya.

5. Landasan teori (alat bantu analisis)

Ada dua teori besar sebagai pisau bedah:

- a. Teori piaget: untuk memahami bahwa siswa kelas V SDN 01 Sungai Ukoi butuh contoh yang nyata (konkret) karena mereka belum bisa berpikir terlalu abstrak.
- b. Teori kohlberg: untuk memetakan apakah siswa anda masih di tahap "takut dihukum" atau sudah mulai masuk ke tahap "sadar karena kewajiban".

6. Hasil akhir (output)

Hasilnya adalah gambaran utuh tentang proses internalisasi nilai. Artinya, ditemukan jawaban bagaimana caranya agar nilai-nilai hak dan kewajiban itu meresap ke dalam hati siswa, sehingga mereka menjadi pribadi yang disiplin secara mandiri sesuai dengan profil pelajar pancasila.